

DINASTI UMAYAH DAN ABBASIYAH POLEMIK SISTEM KEPEMIMPINAN DAN KERUNTUHANNYA

DOI: 10.32534/amf.v3i2.3056

Ahmad Fananie, IAIN Syekh Nurjati Cirebon
nufus.rafi@gmail.com

Nanang Mulyana, IAIN Syekh Nurjati Cirebon
nanang_mulyanan59@yahoo.co.id

Abstract

The reign of the Umayyad and Abbasid caliphs had incised Islamic civilization in their time, the progress of Islamic civilization cannot be denied from the role of the caliph in the Umayyad and Bani Abbasid dynasties. Every government experiences its period of growth, triumph and downfall. This research will analyze the causes of the fall of the Umayyad and Abbasid dynasties, and how the system of appointing a caliph during the Umayyad and Abbasid era changed, and what the difference is with the appointment of the caliph during the Khulafaurosidin era, as well as what values, principles and criteria must be possessed by a leader. Islam which was exemplified by the Prophet Muhammad and Khulafaurosidin, as a role model for Islamic leaders after him. This study uses a qualitative approach by taking sources from a bibliography such as books, journals, and other libraries

Keywords: *umayyad dynasty, abasiah dynasty, khulafa al-rasidin, the appointment of the caliph*

Abstrak

Masa pemerintahan kekalifahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah telah menorehkan peradaban islam pada masanya, kemajuan peradaban islam tidak dapat dinafikan dari peranan khalifah pada dinasti Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Setiap pemerintahan mengalami masa pertumbuhan, kejayaan dan kejatuhannya. Dalam penelitian akan menganalisis sebab-sebab kejatuhan Dinasti Umayyah dan Abasiyah, dan bagaimana perubahan sistem pengangkatan seorang kalifah pada masa Umayyah dan Abasiyah, dan apa perbedaannya dengan pengangkatan khalifah pada masa Khulafaurosidin, serta nilai-nilai, prinsip dan kriteria apa yang harus dimiliki oleh pemimpin islam yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw dan Khulafaurosidin, sebagai suri tauladan bagi pemimpin islam setelahnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil sumber dari daftar pustaka seperti buku, jurnal, dan pustaka lainnya.

Kata kunci: *dinasti umayah, dinasti abbasiah, khulafa al-rasidin, pengangkatan khalifah*

Pendahuluan

Perubahan sistem pemerintahan islam dari masa khulafaurrosidin kepada Bani Umayyah dan Abasiyah khususnya sistem pengangkatan kalifah berdampak pada hasil pemilihan dari sistem yang dipakai. Kualitas seorang kalifah pada masa khulafaurrosidin yaitu Abu Bakar Shidiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib tidak diragukan lagi, karena mereka dipilih dari yang terbaik.

Sedangkan pada masa Bani Umayyah dan Abasiyah pengangkatan kalifah berdasarkan pada garis keturunann, dengan mengangkat putra mahkota sehingga kalifah yang terpilih sangat bergantung pada kondisi putra mahkota, jika putra mahkota baik maka baik pula seorang kalifah yang diangkat, namun jika putra mahkota tidak baik maka kekalifahan tidak mempunyai pilihan lain selain mengangkat putra mahkota.

Tugas seorang khalifah sebagai penerus Nabi Muhammad Saw dalam meneruskan da'wah ke seluruh penjuru dunia, menjadikan peranan khalifah sangat penting dari segi agama, sekaligus sebagai pelayan masyarakat, maka persyaratan pengangkatan seorang khalifah harus memenuhi standar kepemimpinan dalam islam.

Penelitian ini mencoba membandingkan sistem pemilihan pada masa khulafaurosidin dan masa Bani Umayyah dan Bani Abasiyah.

Metode

Metodologi dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kajian Pustaka (Library Reserch) dari jurnal-jurnal dan buku-buku sejarah, serta sumber lainnya. Setelah membaca daftar-daftar pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini, dianalisis permasalahan yang berkaitan dengan obyek penelitian ini yaitu sistem pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abasiyah dan menjabarkan bagaimana sistem pemerintahan pada masa Khulafaurrosidin, kemudian dibandingkan antar masa pemerintahan tersebut, khususnya mekanisme pengangkatan seorang khalifah, dan dihubungkan dengan sebab-sebab keruntuhan Dinasti Umayyah dan Dinasti Abasiyah.

Hasil Dan Pembahasan

Polemik Kepemimpinan dan Sebab-Sebab Keruntuhan Dinasti Umayyah

Daulah Bani Umayyah berdiri pada tahun 661 M/41 oleh Umayyah Bin Abu Sufyan. Umayyah Bin Abu Sufyan berasal dari Mekah suku Qurasy yang merupakan keturunan Bani Umayyah, Bani Umayyah diambil dari kakek Abu Sufyan yaitu Umayyah bin Abd al-Syam.

Berdirinya Dinasti Umayyah diawali dari peristiwa tahkim setelah terjadinya perang Shiffin, di Dumatul Jandal, dengan Khalifah kaum muslimin yang sah yaitu Hasan bin Ali, penyerahan kekuasaan tersebut dilakukan demi memadamkan pemberontakan yang dilakukan oleh Umayyah Bin Abu Sufyan dan menghindari jatuhnya korban.

Isi perjanjian antara Hasan bin Ali dan Umayyah bin abu sufyan adalah sebagai berikut:

1. Muawiyah bin Abu Sufyan akan menyerahkan harta Baitul Mal kepada Hasan bin Ali.
2. Muawiyah bin Abu Sufyan tidak lagi melakukan caci maki dan penghujatan terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib beserta keluarganya
3. Muawiyah bin Abi Sufyan diharuskan menyerahkan pajak bumi dari Persia dan daerah Bijinad kepada Hasan setiap tahun
4. Periode setelah Muawiyah bin Abu Sufyan berkuasa, masalah kepemimpinan islam harus diserahkan kepada umat islam untuk dilakukan pemilihan kembali pemimpin umat islam yang baru.
5. Muawiyah bin Abu Sufyan tidak boleh menarik suasuatupun dari penduduk Madinah, Hijaz, dan Irak, sebab hal itu telah menjadi kebijakan Khalifah Ali bin Abi Thalib sebelumnya.

Akhirnya pada tahun 41 H / 661 M terjadi kesepakatan damai antara Hasan dan Muawiyah yang dikenal dengan Aam Jamaah, karena kaum muslimin sepakat hanya memilih satu pemimpin saja yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan

Setelah menjadi Khalifah kaum muslimin Muawiyah bin Abu Sufyan menerapkan gaya kepemimpinan model raja-raja Persia dan Romawi berupa peralihan kekuasaan secara turun temurun, kondisi ini sekaligus menandai

berakhirnya sistem pemerintahan model khulafaurrasidin. Sistem pemerintahan ini dikenal dengan *patrimonialisme*, yaitu sistem pemerintahan yang memberikan hak kepada pemimpin untuk menganggap negara yang bisa diwariskan secara turun temurun. Menurut konsep ini, kekuasaan pemimpin bersifat mutlak dan menutup dari campur tangan orang lain (terlebih hukum konstitusional).¹ Tidak hanya itu, mereka menyebut diri mereka sebagai wakil Tuhan dan penenus Nabi.²

Dinasti Bani Umayyah berlangsung selama 90 tahun (41-132H/661-750 M) masa kekalifahan Bani Umayyah banyak hal yang ditorehkan yang dianggap sebagai peradaban islam pada masanya, perkembangan ilmu pengetahuan berkembang pesat seiring dengan dukungan kekalifahan terhadap ilmu pengetahuan, seperti filsafat, kedokteran, militer, dan lain-lain.

Ekspansi yang dilakukan oleh kekalifahan Bani Umayyah ke wilayah timur yaitu Balkh, Bukhara, Khawarizm, Ferghana dan Markhand. Tentaranya bahkan sampai ke India dan dapat menguasai Balukhistan, Sind dan daerah Punjab sampai ke Malan. Sedangkan ke barat berhasil menguasai Spanyol dan Perancis.

Selain melakukan ekspansi wilayah kekalifahan juga melakukan pembangunan infrastruktur fisik seperti : jalan raya. Mencetak mata uang, panti asuhan, Membangun gedung pemerintahan, masjid, rumah sakit, sekolah kedokteran.

Polemik Kepemimpinan dan Keruntuhan Dinasti Abbasiyah

Sistem pemerintahan Dinasti Abbasiyah dengan Dinasti Umayyah yakni *patrimonialisme*.³ Dinasti Abasiyah didirikan oleh Abdullah al-Saffah ibn Muhammad ibn Ali bin Abdullah al-Abbas. Pemerintahan yang diterapkan oleh dinasti Abbasiyah bervariasi menyesuaikan dengan kondisi politik, sosial dan budaya yang terjadi. Menurut Aminullah, Dinasti Abbasiyah terjadi beberapa kondisi, yaitu:

¹ Antony Black, *Pemikiran Politik Islam: dari Masa Nabi hingga Masa Kini*. (Jakarta: Serambi, 2006), 50.

² *Ibid.*, 51

³ M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2009), 179-181.

1. Periode I (132H-232H / 750M-847M), Persia I.
2. Periode II (232H-334H / 847M-945M), Turki I.
3. Periode III (334H-447H / 945M-1055M), pemerintahan Dinasti Buwaih.
4. Periode IV (447H-590H / 1055M-1194M), periode Bani Seljuk (Turki II).
5. Periode V (590H-656H / 1194M-1250M), periode ini terbebas dari pengaruh Dinasti lainnya.”

Setelah kalifah silih berganti secara turun temurun, dan mencapai kejayaan sebagai sebuah daulah, Dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran, hal ini disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal :

1. Lemahnya Khalifah yang diangkat
2. Munculnya kerajaan-kerajaan kecil yang memerdekakan diri (disintegrasi).
3. Kemerostan ekonomi,
4. Munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme agama.

Sedangkan yang menjadi faktor eksternalnya yakni :

1. Perang salib,
2. Serangan Mongolia.

Prinsip Kepemimpinan Islami

Menurut Rivai dan Zainuddin, prinsip-prinsip dasar kepemimpinan islami, yaitu sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab. Seorang pemimpin harus mempunyai sifat tanggung jawab karena setiap tindakannya akan berdampak pada obyek yang dipimpinnya dan akan dimintai pertanggungjawabannya diakhirat kelak. Sifat tanggung jawab adalah substansi utama yang harus ada dalam pada calon pemimpin agar amanah yang diserahkan tidak disalahgunakan.
2. Tauhid. Pemimpin Islam harus berpegang teguh pada tauhid dan mengarahkan kekuatan akidah, tauhid dalam kepemimpinan dapat menjadi benteng dalam mengemban amanat yang diemban, selalu merasa diawasi oleh Allah Swt, bekerja ihlas mengharapkan rahmat Allah Swt.

3. Musyawarah. Musyawarah menjadi landasan dalam setiap kebijakan seorang pemimpin, oleh karena itu seorang pemimpin islam harus didampingi oleh para pakar/ahli agama dan ahli ilmu lainnya sehingga keputusan yang dikeluarkan merupakan keputusan yang tepat, bijak dan memberikan maslahat.
4. Adil. Pemimpin islam harus bersikap adil, menegakan hukum dengan adil, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat secara adil tidak berat sebelah , pemimpin yang adil dalam islam memiliki maqom tersendiri.⁴

Pengangkatan Khalifah Era Khulafa al-Rosidin, Era Bani Umayyah dan Abbasiyah

Pada masa Dinasti Umayyah dan Abasiyah pengangkatan khalifah dilakukan mirip dengan sistem kerajaan/monarchi, yaitu mengangkat putra mahkota untuk dijadikan pengganti terhadap kalifah yang wafat. dan tidak lagi menggunakan sistem yang pernah dilakukan pada masa khulafaurrosidin.

Kekhalifahan seringkali harus mengangkat khalifah yang belum cakap, dibawah umur, yang berpotensi ketergantungan khalifah terhadap pembantunya sangat besar sehingga terjadi penghianatan oleh orang-orang kepercayaannya. Sedangkan pengangkatan kalifah pada masa khulafaurrosidin berdasarkan pada senioritas, kedekatan dengan nabi dalam persahabatan dan ketaqwaan, sehingga pada masa khulafaurrosidin dapat diperoleh seorang khalifah yang memenuhi syarat sebagai seorang pemimpin negara/umat dan agama. Ketika Rulafa al-Rasyidin hendak mengambil kebijakan apapun maka mereka bermusyawarah, bahkan terkait hukum mereka bermusyawarah dengan ahli hukum.⁵

Kehidupan kalifah dan keluarganya dipandang hidup bermewah-mewahan, hedonisme sehingga tidak disukai oleh para ulama/tokoh agama. Sedangkan pada masa khulafaurrosidin seorang kalifah hidup sederhana, tidak memanfaatkan kekayaan negara/Baitul Mal untuk kepentingan dirinya dan keluarganya, kekayaan

⁴ www.kajianpustaka.com

⁵ M. Abdul Karim, Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2009), 77-78.

negara digunakan sepenuhnya untuk membantu masyarakat, kepentingan negara, fakir miskin, dan kepentingan umat lainnya.

Proses pengangkatan Khalifah yang tidak jelas pada dinasti Umayyah dan Abasiyah dan menyelisih Sunnah Khulafaurrasidin, mengakibatkan kelemahan secara internal pada Dinasti Umayyah dan Abasiyah, karena menghasilkan pemimpin yang tidak mempunyai kriteria dan kualitas yang jelas seperti sidiq, fathonah, amanah, tabligh, bertaqwa, adil, musyararah, kecerdasan, bertanggung jawab, suri tauladan sebagai kriteria kepemimpinan dalam islam.

Pada masa awal islam pasca wafatnya Rasulullah saw, Ia sebagai pemimpin umat islam, tampuk pemerintahan dijalankan oleh para sahabat Rasul saw terdekat yang berganti-ganti berdasarkan kepantasan dan persetujuan sahabat yang lainnya, model pemilihan ini menjadi sunnah khulafaurrasidiin dalam memilih seorang pemimpin dan bisa dijadikan rujukan pada masa sesudahnya, seorang khalifah dikelilingi oleh sahabat-sahabat nabi yang lain yang mempunyai tujuan yang sama dalam memimpin umat islam, pada masa khalifah Abu Bakar siddiq dikelilingi oleh Umar bin Khattab, Usman bin Affan bahkan Ali bin Abi Thalib dan sahabat yang lainnya, mereka selalu bermusyawarah sebelum mengambil keputusan. Namun dengan berdirinya dinasti Umayyah dan berakhirnya masa khulafaurrosidin model ini tidak dipergunakan untuk mengangkat khalifah berikutnya.

Model pemilihan khalifah pada masa khulafaurrasidiin memungkinkan tampuk pimpinan seorang khalifah akan berpindah tangan kepada pihak yang bukan dari turunan/keluarga khalifah, hal ini yang dikhawatirkan oleh Dinasti Umayyah dan Abasiyah, dengan tidak lagi menjadi khalifah, maka kekuasaan dan fasilitas yang selama ini melekat pada keluarga khalifah akan berpindah tangan kepada khalifah yang baru.

Metode pemilihan pada era khulafaurrasidiin menghasilkan pemimpin yang baik pada masanya untuk kepentingan negara, masyarakat dan agama, karena negara dan masyarakat akan mendapatkan seorang khalifah terbaik diantara calon khalifah yang ada.

Pada masa kekalifahan Bani Umayyah, terdapat beberapa khalifah yang memiliki kapabilitas yang baik seperti Umayyah Bin Abu Sufyan, Umar Bin Abdul

Aziz, Abdul Malik Bin Marwan, Walid Bin Abdul Malik dan dimasa Bani Abasiyah seperti Abul Abas As-Saffah, Abu Ja'far Al Mansyur, Abu Abdullah Muhammad Al Mahdi, Abu Jafar Harus AL Rasyid. Sedangkan pada pemerintahan Bani Abasiyah pemerintahan mencapai puncaknya pada masa Al Mahdi, Al Hadi, Harun Al Rasyid, Al Amin, Al Ma'mun, Al Mu'tasim, Al Wasiq, dan Al Mutawakkil.

Jika dibandingkan dengan masa Khulafaurrasidin maka semua khalifah memiliki kapabilitas sebagai seorang khalifah/pemimpin/kepala negara, yaitu Abu Bakar Shiddik, Umar Bin Khattab, Usman Bin Affan dan Ali Bin Abi Thalib. (Al Ajji,2019:83)

Dinamika dan Polemik Kedudukan Khalifah

Kedudukan kalifah mempunyai peranan yang sangat penting dalam islam, tugas kalifah adalah sebagai berikut:

1. Pemimpin umat islam,
2. Penerus perjuangan Nabi Muhammad Saw, dengan bersandarkan pada Alquran dan Asunnah,
3. Kepala negara dan kepala pemerintahan, serta
4. Mengembangkan dan memperluas wilayah islam.

Pemimpin/khalifah, atau kepala negara adalah seseorang yang dipercaya dalam melayani, mengatur masyarakat (umat) dalam segala urusan kenegaraan. Dan menurut al-Mawardi khalifah atau imamah adalah suatu kedudukan atau jabatan yang diadakan untuk menggantikan tugas kenabian didalam memelihara agama dan mengendalikan dunia. Istilah khalifah atau imamah pada awalnya diperuntukkan untuk menyebut orang-orang yang dipercaya memimpin suatu kaum sekaligus dipercaya masyarakat sebagai tokoh yang menggantikan peran Nabi Muhammad saw.

Proses pemilihan yang tidak berdasarkan pada kualitas calon pemimpin juga mempunyai risiko mendapatkan pemimpin yang otoriter, terjadi penyalahgunaan wewenang, pengabaian terhadap hukum, bahkan menurut Ibnu Khaldun, dapat terbentuk apa yang disebut dengan al-Mulk/kerajaan natural, maksudnya pemerintahan yang berdasarkan pada kepentingan dan kekuasaan pribadi anggota

kerajaan. Sedangkan yang dimaksud dengan tabiat natural adalah kecenderungan dalam satu individu, seperti egoism, arogan atau despotis, keserakahan individu. Jenis pemerintahan ini dikenal saat ini dengan pemerintahan otoriter, individualis, otokrasi, atau inkonstitusional.

Beban yang ada dipundak pemimpin sangat berat dan merupakan suatu musibah karena seorang pemimpin harus memelihara kehidupan di wilayahnya, menghalau serangan musuh dari luar yang akan membinasakan masyarakatnya, menyelamatkan akidah/agama warganya, menjaga harta, akal, oleh karena itu sangat diperlukan pemimpin yang *capable* dan mampu mengemban amanat tersebut.

Dinasti Umayyah menganggap bahwa khalifah adalah wakil Tuhan dan penerus Nabi saw, sehingga fungsi penting pengendalian dan penetapan syari'at juga dapat dikendalikan oleh Khalifah, fungsi model ini pernah diklaim oleh al-Walid II.⁶ Demikian juga Dinasti Abbasiyah menganggap bahwa kekuasaan khalifah berasal dari mandat Tuhan, bukan pilihan rakyat. Oleh karenanya, kekuasaan dipandang suci dan mutlak harus dipatuhi.⁷

Nilai-Nilai Kepemimpinan Islam Khulafa al-Rasyidin

Pada masa Khulafaurrosidin terdapat beberapa nilai-nilai yang menjadi panutan dalam kepemimpinannya, diantaranya yaitu:

1. Niat dan tujuan.

Setiap khalifah yang diangkat dalam menerima amanat sebagai khalifah semata-mata untuk pengabdian kepada masyarakat/umat, bukan untuk meraih jabatan, kekayaan, status hal ini dapat dibuktikan pada mendapatkan amanat sebagai khalifah, contohnya adalah ketika Abu Bakar shidiq menerima amanat, Abu Bakar ingin menunjuk Umar sebagai khalifah dan Umar Bin Khattab pun menolak dirinya ketika akan diangkat oleh Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar Shiddiq ketika akan wafat tidak menunjuk anaknya untuk menjadi khalifah, namun

⁶ Ahmad Syalabi, Sejarah dan Kebudayaan Islam, Jil. 1, (Jakarta, Pustaka Al-Husna Baru, Cetakan ke-6, 2003), 42-43.

⁷ Muhammad Iqbal dan Husein Nasution, Pemikiran Politik Islam: dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 3.

mengumpulkan para sahabat senior yaitu Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Usaid bin Khundur yang kemudian mengangkat Umar bin Khattab sebagai khalifah berikutnya, disini terdapat nilai berupa “musyawarah”, meskipun dengan berat, akhirnya Umar dapat menerima pengangkatannya sebagai khalifah. Begitu juga ketika Umar akan wafat beliau menunjuk sahabat-sahabatnya untuk mencari pengganti dalam sebuah Dewan Presidium mereka adalah Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah, Zubair, Saad bi Abi Waqosh, Abdurahmab bin Auf sedangkan putranya Abdullah bin Umar menjadi anggota namun tidak boleh dipilih hanya memberi pendapat saja, inilah nilai terpuji yang dimiliki oleh Umar bin Khattab, yang tidak mau anaknya dipilih menjadi khalifah karena faktor keturunan. Yang akhirnya Dewan Presidium memilih Usman bin Affan sebagai khalifah. Setelah Usman wafat maka umat islam memilih Ali sebagai khalifah namun ali bin Abi Thalib menolaknya dan Ali menganggap Thalhah dan Zubairlah yang lebih cocok sebagai khalifah, namun Thalhah dan Zubair malah membaiat Ali sebagai khalifah dan Ali terpaksa menerima pengangkatan khalifah, namun hal ini berbeda dengan Umayyah bin Abu Sufyan yang melakukan pemberontakan kepada khalifah Ali namun gagal, dan ketika kekalifahan diberikan kepada Hasan bin Ali oleh umat islam, Muawiyah bin Abu Sufyan melakukan pemberontakan, yang akhirnya demi menghindari jatuhnya korban jiwa lebih banyak Khalifah Hasan bin Ali melakukan perdamaian dengan Muawiyah bin Abu Sufyan, dan berdirilah Dinasti Umayyah sebagai khalifah umat islam yang baru.

2. Hidup Sederhana

Nilai berikutnya yang terkandung pada khalifah masa Khulafaurrosidin adalah tidak memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri, mereka hidup sederhana meskipun memiliki Baitul Mall sebagai tempat perbendaharaan negara, bahkan khalifah Abu Bakar masih berjualan dipasar untuk menghidupi keluarganya, yang kemudian akhirnya diberi gaji dari baitul mal kepada para khalifah. Kehidupan yang sederhana ini menjadi role model dalam kepemimpinan islam, dengan hidup sederhana para khalifah tidak merasakan kenikmatan dunia yang akan melenakan, dan lupa akan perintah Allah Swt yaitu melaksanakan

tugasnya sebagai seorang khalifah, yang mau mengurus rakyatnya, memberikan bantuan kepada rakyatnya, mendistribusikan kekayaan negara kepada yang membutuhkan, hidup sederhana dan tidak berfoya-foya bukan hanya dilakukan oleh diri khalifah, namun juga terhadap keluarganya, sehingga keluarganya juga tidak tergiur dengan besarnya perbendaharaan negara. Kehidupan sederhana tidak dijalankan oleh Dinasti Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, para khalifah dan keluarganya hidup dalam hedonisme dan berkemewahan sehingga menjadi ketergantungan pada kenikmatan dunia, yang akan sulit dilepaskan ketika situasinya berubah, seperti adanya penggantian khalifah, karena demi kepentingan kenikmatan jabatan terjadilah perebutan kekuasaan, meskipun demikian pada masa Umar bin Abdul Aziz dan Harun Al Rashid perhatian kedua khalifah ini sangat baik terhadap kepentingan rakyatnya, sehingga terbentuk masyarakat islam yang makmur.

3. Taqwa

Ketaqwaan menjadi syarat utama dalam pengangkatan seorang khalifah, selama masa Khulafaurrosidin tidak ada satupun khalifah yang diangkat diragukan ketaqwaannya, karena syarat ini menjadi pertimbangan utama selain senioritas, kedalaman pemahaman dalam agama, persyaratan ini menjadi modal bagi pemimpin untuk mengemban amanat yang besar, karena karakter ini menjadikannya berintegritas, bertanggungjawab, mau melayani, bersikap adil, dan menegakan hukum Allah secara adil dan bijaksana. Ketaqwaan seorang khalifah mutlak sangat diperlukan, pada masa Diansti Umayyah kita mengenal Umar bin Abdul Aziz, pada masa Diansti Abasiyyah kita mengenal Harun Al Rasyid yang ketaqwaan dan ilmu yang dimiliki kedua khalifah tersebut sangat baik.

4. Prinsip Syura (Musyawarah)

Musyawarah telah diterapkan pada kepemimpinan islam yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sendiri yang sering berdialog dengan para sahabatnya baik dalam menentukan strategi perang, maupun perkara lainnya. Begitu juga yang dilakukan oleh khalifah pada masa khulafaurrosidin, musyawarah selalu dilakukan dalam memutuskan berbagai hal yang berkaitan dengan pemerintahan, khususnya permasalahan yang tidak ditemukan dalam nash Alquran dan Sunnah Nabi. Umar

bin Khattab berkata : “Tidak ada kebaikan dalam suatu urusan yang diputuskan tanpa dengan musyawarah”.

Kesimpulan

Kepemimpinan islam dimulai sejak Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi dan rosul, nabi Muhammad sebagai pemimpin agama dan pemerintahan telah meletakkan dasar-dasar dalam kepemimpinannya, setelah Nabi Muhammad Saw wafat estafet kepemimpinan diteruskan oleh para kalifah Abu Bakar Shiddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, yang dikenal dengan masa khulafaurrosidin, masa khulafaurosidin merupakan contoh yang baik dalam mengelola pemerintahan diluar Nabi Muhammad Saw, kepemimpinan mereka mempunyai nilai-nilai yang sangat luhur yang merupakan cermin dari kualitas moral/ahlak sebagai seorang sahabat nabi Muhammad Saw, periode ini merupakan zaman terbaik dan dapat dijadikan role model dalam kepemimpinan pada periode setelahnya. Namun dasar-dasar kepemimpinan yang telah diletakan oleh Nabi Muhammad dan khulafaurosidin tidak selalu dijalankan oleh pemerintahan islam setelahnya, termasuk Dinasti Bani Umayyah dan Bani Abasiyah, seperti pengangkatan khalifah baru, prinsip-prinsip kepemimpinan islam dan nilai-nilai kepemimpinan islam tidak lagi menjadi landasan utama dalam mengelola pemerintahan. Sehingga karena kurangnya konsistensi system kepemimpinan di era Umayyah dan Abbasiyah terhadap system kepemimpinan Rasulullah saw dan Kulafa al-Rasyidin menyebabkan polemic politik dan keruntuhan di era dua dinasti tersebut. Bila system kepemimpinan di era kulafa al-Rasyidin adalah musyawarah dan demokratis tanpa monarkhi (kerajaan) namun system pergantian kepemimpinan di era Umayyah dan Abbasiyah menggunakan system monarkhi (kerajaan).

Para pemimpin islam atau negeri-negeri islam perlu melihat kembali dasar-dasar kepemimpinan islam sebagai landasan dalam mengelola pemerintahan, contoh, hikmah dan suri tauladan telah diletakan oleh pemimpin-pemimpin islam pada masa lalu, mulai dari masa Nabi Muhammad Saw, Khulafaurosidin, Kalifah

Bani Umayyah dan seterusnya, dengan tujuan agar terbentuk pemerintahan yang baik yang mampu mensejahterakan masyarakat, menegakan keadilan.

Daftar Pustaka

Abdul Karim, M., Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2009.

Abdul Syukur Al azizi., Sejarah terlengkap Peradaban Islam, 2019.

Black, Antony, Pemikiran Politik Islam: dari Masa Nabi hingga Masa Kini, Jakarta: Serambi, 2006.

Bobbi Aidi Rahman, Hedonisme dan Pengaruhnya Terhadap Khalifah Bani Umayyah, 2018.

Budiyati, Anisa Dwi Makrufi, Peradabab Islam Periode Daulah Abbasiayah Dalam Meningkatkan Minat Membaca Masyarakat, 2019.

Hemlan Elhany, “Kepemimpinan Dalam Islam Serta Prinsip-prinsip Pemerintahan Dalam Alquran”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. 2019.

Iqbal, Muhammad dan Husein Nasution, Pemikiran Politik Islam: dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Najili Aminullah, A., Dinasti Bani Abassiyah, Politik, Peradaban Dan Intelektual, 2017.

Syalabi, Ahmad, Sejarah dan Kebudayaan Islam, Jil. 1, Jakarta, Pustaka Al-Husna Baru, Cetakan ke-6, 2003.

www.kajianpustaka.com